

## **ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PADA WILAYAH ADAT MAMTA PROVINSI PAPUA**

**Hasan Basri Umar<sup>1</sup>**

*hasanbasri@feb.uncen.ac.id*

**Risky Novan Ngutra<sup>2</sup>**

**La Maga<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Kebijakan Pemerintah terhadap perkembangan perekonomian guna meningkatkan perekonomian daerah dikawasan wilayah adat Mamta Provinsi Papua. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menetapkan kebijakan ekonomi, khususnya di wilayah adat Mamta yang berkaitan dengan pemanfaatan seluruh sumberdaya pembangunan guna meningkatkan perkembangan perekonomian terutama disektor fiskal, sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi masyarakat pada wilayah adat Mamta Provinsi Papua. Penelitian ini memaparkan beberapa hasil temuan terutama besaran dampak Kebijakan Pemerintah melalui Program pembangunan Ekonomi Wilayah Adat Mamta dengan pengembangan perekonomian masyarakat lokal pada program bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pengembangan ekonomi pada masyarakat yang berdomisili dikawasan adat Mamta Provinsi Papua.

**Kata kunci: Perkembangan Ekonomi, DAK, DAU**

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi khusus memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan keuangan daerah Provinsi Papua secara signifikan, namun kebijakan tersebut belum berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua. Kebijakan otonomi khusus hanya mampu meningkatkan perekonomian daerah saja dan tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2016, IPM Provinsi Papua masih termasuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia menengah bawah dengan nilai 65,36. Selain itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua juga masih merupakan yang tertinggi di Indonesia dengan persentase sebesar 31,96%. Perbedaan utama dan paling mendasar antara otonomi umum dan otonomi khusus menurut Van Houten (2004) terletak pada kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat setempat. Widodo (2019).

Bagi pemerintah Provinsi Papua, kebijakan otonomi khusus seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin guna meningkatkan perekonomian daerah dan juga masyarakatnya. Apa yang telah diprogramkan dalam kebijakan otonomi khusus harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga manfaat otonomi khusus dapat sampai kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya (Solossa, 2006).

Salah satu kelompok masyarakat yang sering termarginalkan dalam pembangunan adalah masyarakat tradisional, khususnya komunitas adat. Kelompok masyarakat tersebut jauh lebih rendah tingkat kesejahteraannya bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini terjadi bukan hanya pada negara-negara sedang berkembang bahkan juga di negara-negara maju. Komunitas adat seperti Suku Indian di Amerika Serikat dan Suku Aborigin di Australia relatif lebih rendah tingkat

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

kesejahteraannya bila dibandingkan dengan komunitas-komunitas lainnya di sana. Hal yang sama juga terjadi pada komunitas-komunitas adat di Indonesia, khususnya komunitas adat di Papua.

Pada periode 2014 hingga tahun 2017 pemerintah propinsi Papua melaksanakan kebijakan program pemerintah lanjutan bernama GERBANGMAS HASRAT PAPUA sebagai kepanjangan dari Gerakan Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua untuk tuntas wajib belajar 9 tahun, perbaikan mutu generasi emas (GEMAS) Papua, dan berdaya ekonomi serta pemenuhan Infrastruktur. Kebijakan Program khusus ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya serta kesabaran dalam pelaksanaannya, tetapi cita-cita besar ini harus dimulai dari sekarang dengan menyiapkan generasi yang akan lahir, yang telah lahir dan memper-siapkan kapasitas ekonomi untuk membangun kemandirian sehingga memutus rantai ketertinggalan antar generasi.

Secara umum, kebijakan program tersebut diharapkan akan mempengaruhi IPM Provinsi Papua dari tahun ke tahun, namun pada kenyataannya pencapaian angka IPM Papua masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Papua Barat. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua relatif masih berada di bawah kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat. Disamping itu, capaian IPM Papua dan Papua Barat masih berada di bawah rata-rata IPM nasional.

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perkembangan perekonomian pada wilayah Adat Mamta Provinsi Papua;

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan pemerintah terhadap perkembangan perekonomian pada wilayah Adat Mamta Provinsi Papua

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis Data

Untuk menganalisis struktur ekonomi daerah digunakan dalam adalah Tipologi Klassen.

**Tabel 1.**  
**Tipologi Klassen**

Kontribusi sectoral	Pertumbuhan sektoral	
	$g_i \geq g$	$g_i < g$
$s_i \geq s$	Sektor maju dan tumbuh pesat	Sektor masju tapi tertekan
$s_i < s$	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	Sektor relative tertinggal

Sumber: Sjafrizal. 2008

Keterangan:

- $g_i$  = pertumbuhan sector daerah analisis;
- $g$  = pertumbuhan sector daerah acuan;
- $s_i$  = kontribusi sector daerah analisis;
- $s$  = kontribusi sector daerah acuan

Analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan suatu daerah. Tipologi Klassen dengan pende-katan sektoral (yang dapat diperluas tidak hanya di tingkat sektor tetapi juga subsektor, usaha

ataupun komoditi) menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.

- 1) Kuadran I. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat.
- 2) Kuadran II. Sektor maju tapi tertekan.
- 3) Kuadran III. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat.
- 4) Kuadran IV. Sektor relatif tertinggal.

Pada tipologi Klassen, daerah acuan adalah daerah yang lebih tinggi. Misalnya, kalau daerah analisis adalah kabupaten/kota, daerah acuan bisa menggunakan propinsi. Kalau daerah analisis adalah propinsi, maka daerah acuan bisa menggunakan nasional atau pulau, ataupun wilayah pembangunan tertentu dimana daerah analisis meru-pakan bagian dari wilayah tersebut.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Deskripsi Wilayah Adat Mamta**

Total anggaran tahun 2017 pada wilayah adat Mamta sebesar 10 milyar rupiah yaitu masing-masing 5 milyar rupiah untuk Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. Hasil intervensi Program Gerbangmas Hasrat Papua telah turut berperan dalam peningkatan IPM Kabupaten Sarmi dimana terhitung sejak tahun 2013-2016 nilai indeks ini telah mengalami peningkatan sebesar 1,70 % (BPS, 2016). Intervensi program dalam bidang kesehatan yang difokuskan pada program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui intervensi gizi balita (pemantauan balita di posyandu, imunisasi, vitamin A, dan PMT) dan Intervensi ibu hamil (kelas ibu hamil, PMT ibu hamil) telah berperan dalam perubahan pengetahuan dan perilaku ibu serta menyiapkan bayi sehat guna perwujudan Generasi Emas Papua. Hasil capaian intervensi program juga telah mampu meningkatkan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal KIA (Kesehatan Ibu Anak).

Program ekonomi kemasyarakatan bertujuan mendukung perwujudan pemberdayaan perekonomian berbasis komoditas lokal atau kampung dalam rangka peningkatan perekonomian yang produktif dan kreatif serta peningkatan kapasitas dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat asli Papua. Pengembangan dan pengelolaan tanaman perkebunan kelapa yang dilakukan oleh masyarakat kampung Betaf dan Nengke di kabupaten Sarmi merupakan salah satu upaya meningkatkan angka kesejahteraan perekonomian orang asli Papua (OAP) yang merujuk pada konsep pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas dari masyarakat lokal bisa dijadikan program percontohan untuk diikuti oleh kabupaten lain penerima program Gerbangmas atau bahkan seluruh kabupaten di Provinsi Papua.

Di Kabupaten Keerom untuk Intervensi program ekonomi, terdapat sejumlah petani yang telah mendapatkan penyuluhan peningkatan produk-si pertanian, perikanan dan penyuluhan terhadap sejumlah peternak. Selain itu, Sejumlah 250 ekor ayam ras, 25 ekor sapi dan 50 ekor babi telah didistribusikan ke sejumlah kelompok peternak. Kemudian, gudang coklat, alat penyemprot dan bibit juga telah digu-nakan di petani kakao kampung Pund.

Program Pendidikan berpola asrama yang di terapkan Kabupaten Keerom dalam program Gerbangmas Hasrat Papua guna mendukung peningkatan Pendidikan dasar 9 tahun bisa dijadikan program percontohan untuk diikuti oleh Kabupaten Lain penerima program Gerbangmas atau bahkan seluruh Kabupaten di Provinsi Papua. Pendidikan berpola asrama yang diterapkan oleh SD dan SMP Satu Atap Bompai, Distrik Waris, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Diketahui kondisi geografis kabupaten Keerom yang relatif sulit menyebabkan banyak siswa seko-lah yang terus menempuh perjalanan jauh untuk sekolah. Lokasi kampung-kampung di kabupaten Keerom yang tersebar menyebabkan pembangunan Pendidikan sulit dilaksanakan yang juga sangat didukung oleh ketidak terse-dianya sarana/prasarana transportasi pendukung. Dengan demikian, sekolah berpola asrama yang telah diterapkan ini merupakan solusi terbaik saat ini guna meningkatkan sumber daya manusia sejak usia dini dengan memper-timbangkan kondisi geografis.

## Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan ketersediaan data PDRB berdasarkan lapangan usaha, perhitungan tipologi Klassen ini akan dianalisis berdasarkan data periode 2013 – 2016. Sejumlah kabupaten, data sekunder yang terpublikasi ada yang *ter-update* 2010-2016, 2010-2017 atau 2013-2017. Daerah pembanding acuan bagi setiap kabupaten adalah PDRB propinsi Papua. Rata-rata pertumbuhan ekonomi propinsi Papua berdasarkan PDRB adalah 5,36% dimana pertumbuhan (g) yang tergolong tinggi antara lain: administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (13,21%), konstruksi (10,25%) serta transportasi dan pergudangan (10,34%). Lapangan usaha lainnya tidak mengalami pertumbuhan yang tinggi, namun berkontribusi (s) tinggi bagi pemerintah propinsi yaitu: pertambangan dan penggalian (42,74%), pertanian, kehutanan dan perikanan (11,23%) serta konstruksi (10,49%).

### 1) Analisa Kesenjangan Sektoral Kabupaten Keerom

Pada Kabupaten Keerom rata-rata pertumbuhan (g) PDRB mencapai 7,70% dimana lapangan usaha yang masuk dalam kuadran sektor maju pesat (kuadran 1) adalah: pertanian, kehutanan dan perikanan (g = 7,34%; s = 34,12%) serta jasa pendidikan (g = 8,6%; s = 2,71%). Sedangkan sejumlah lapangan usaha yang masuk dalam kategori sektor relatif tertinggal (kuadran 4) antara lain: pertambangan dan penggalian (g = 4,71%; s = 1,13%), transportasi dan pergudangan (g = 6,40%; s = 0,99%), jasa keuangan dan asuransi (g = 5,38%; s = 1,25%) serta jasa perusahaan (g = 6,50%; s = 0,05%).

### 2) Analisa Kesenjangan Sektoral Kabupaten Sarmi

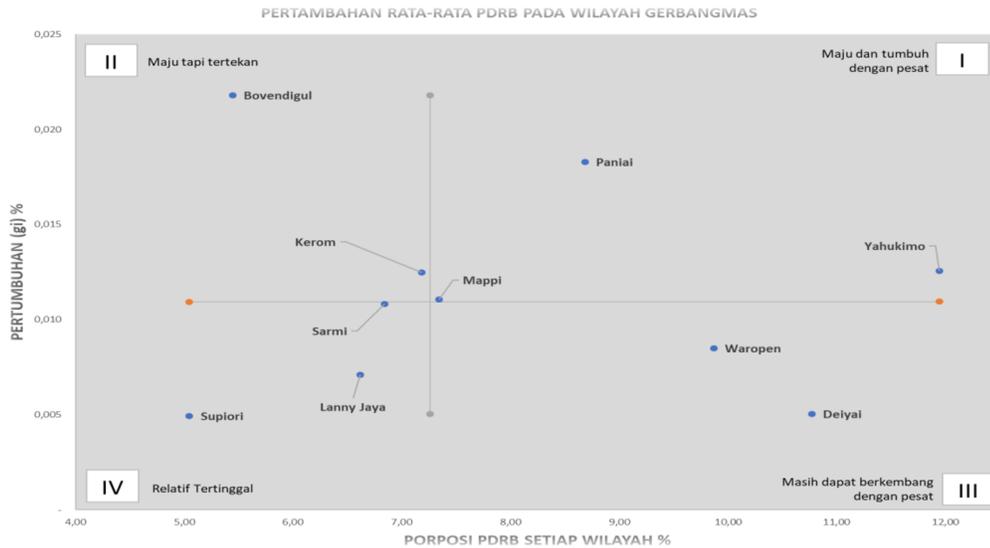
Pada Kabupaten Sarmi rata-rata pertumbuhan (g) PDRB mencapai 7,32% dimana lapangan usaha yang masuk dalam kuadran sektor maju pesat (kuadran 1) adalah: pertanian, kehutanan dan perikanan (g = 5,03%; s = 35,88%), **pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah (g = 5,91%; s = 0,07%)**, serta jasa pendidikan (g = 8,6%; s = 2,71%), real estate (g = 8,71%; s = **2,85%**) serta jasa pendidikan (g = 10,44%; s = 3,00%). Sedangkan sejumlah lapangan usaha yang masuk dalam kategori sektor relatif tertinggal (kuadran 4) antara lain: **penyediaan akomodasi dan makan minum (g = 9,22%; s = 0,59%)**, serta sektor informasi dan komunikasi (g = 5,17%; s = 2,85%).

### 3) Analisis Posisi Wilayah.

Hasil pemodelan hipotesis khususnya pada kelima indikator dana program hal terpenting untuk meningkatkan kinerja program adalah indikator perencanaan. Konsep satu program harus dapat diturunkan secara rinci pada bagian perencanaan. Dukungan untuk menghasilkan perencanaan yang baik, pemerintah daerah harus menerbitkan petunjuk perencanaan program yang mudah dipahami. Perencanaan program selalu melewati pertemuan-pertemuan pengambilan keputusan. Komponen masyarakat perlu aktif ikut serta dalam merencanakan program pemerintah.

Program Gerbangmas Hasrat Papua menggunakan pendekatan spasial kultural Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Potensi Lokal. Artinya Gerbangmas Hasrat Papua menggunakan 5 wilayah adat sebagai lokasi penerapan program. Tiap lokus yang dipilih mewakili 5 wilayah adat yaitu Laa Pago, Mee Pago, Anim Ha, Mamta dan Saireri. Sedangkan kebutuhan dasar berkaitan dengan sektor utama Otsus Papua yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan Infrastruktur Dasar.

**Gambar 1.**  
**Posisi Daerah berdasarkan tipology Klassen**



Pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah yang menjadi intervensi Program Gerbangmas Hasrat Papua berdasarkan analisa Tipology Klassen atau analisis kesenjangan sektoral yang mendasarkan pengelompokan suatu sektor atau sub sektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Papua mengalami pertumbuhan sektoral dengan kategori maju tapi tertekan adalah Kabupaten Keerom dengan rata-rata pertumbuhan 7,18 dengan rerata Provinsi sebesar 0,012, kemudian kabupaten yang masuk dalam kategori Kuadran kuadran ke empat yang relatif tertinggal adalah Kabupaten Sarmi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,84 dengan rerata provinsi sebesar 0,012.

## PENUTUP

### Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan pembahasan adalah Deskripsi pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah adat menunjukkan adanya kesenjangan sektoral dimana pertumbuhan sektor yang maju tapi tertekan adalah Kabupaten Keerom, sedangkan pertumbuhan sektor yang tertinggal adalah Kabupaten Sarmi. Komponen kinerja program seperti capaian, keluaran, manfaat dan ketepatan sasaran yang dikelola dengan baik pada setiap wilayah akan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan serta informasi dalam bidang ilmu ekonomi terutama ilmu ekonomi pembangunan. Bagi pemerintah daerah di propinsi Papua dan pada seluruh kabupaten di propinsi Papua bisa melakukan evaluasi dan perencanaan program yang mendukung aktifitas masyarakat yang bisa berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfranca, Oscara; Miguel - Angel Galindo Martin and Blanca Sanchez - Robles. (2001). Economic Growth and Income Distribution in the OECD Countries;
- Amien, A. Mappadjantji. (2005). Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Djojoseokarto, Agung, Rudiarto Sumarwono, Cucu Suryaman. (2008). Kinerja Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia;
- Friedmann, John. 1981. Perencanaan Sebagai Proses Belajar. Dlm D.C. Korten & Sjahrir (1988), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, hlm.250-257. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;

- Mandowen Janet E.L, Marlisa Elsyhan R, Patty Richard. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Lima Wilayah Adat Di Papua. *Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume VII No. 1, April 2020;
- Koentjaraningrat. (1994). *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan;
- Korten, D.C dan Sjahrir. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Krisdyatmiko dan Sutoro Eko. (2006). *Kaya proyek miskin kebijakan*. Yogyakarta: IRE Press;
- Kumar, Nalini (2003). *Community-Driven Development A Study Methodology*. Bank and non-Bank Participants Workshop, Washington D.C., July 29;
- Marlisa, Elsyhan, R.; Mandowen, Janet, E.L.; & Patty, Richard. (2020). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja Dan Indeks Kemahalan Konstruksi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Lima Wilayah Adat Provinsi Papua Periode 2012-2016. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume VII No. 1, April 2020.
- Sahdan, Gregorius. (2007). Menanggulangi Kemiskinan Kota. <http://www.kemenegpdt.go.id/artikel.asp.id>;
- Semboari, Yakop. (2012). *Pemberdayaan Kampung Bidang Perumahan dan Infrastruktur Dasar (Konteks Program Respek Papua)*, Studi di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua, Tesis Program Studi Sosiologi, Universitas Gadjah Mada;
- Suebu. (2008). *Inovasi dan Terobosan Bagi Papua Baru*. Papua. Pemerintah Provinsi Papua;
- Sumodiningrat, Gunawan. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT Bina Parawira. Jakarta;
- Teixeira, Aurora and Natércia Fortuna. (2003). Human Capital, Innovation Capability and Economic Growth, *Investigacao Trabalhos em curso*. No. 131. Julho de 2003;
- Throsby, David. (2001). *Economic and Culture*. United Kingdom: Cambridge University Press;
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, Nunung Ayu Sofiati. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Andi. Yogyakarta.